

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PKT untuk pekerjaan pembangunan jalan untuk periode 2018-2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan PKTDes tahun 2018-2020 belum seluruh nagari efisien secara teknis baik biaya maupun sistemnya. Secara rerata tingkat efisiensi dalam 3 (tiga) periode tersebut sebesar 77,80% atau terjadi inefisiensi 22,20%. Nilai tersebut dibentuk dari rerata perolehan efisiensi teknis biaya sebesar 68,20%, dan efisiensi teknis sistem sebesar 87,41%. Kondisi inefisiensi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban alokasi upah minimal sebesar 30% per kegiatan dalam kegiatan PKTDes masih belum dapat dikelola dengan prinsip efisiensi keuangan yang baik.
2. Faktor penyebab terjadinya inefisiensi teknis biaya dikarenakan kewajiban alokasi upah minimal 30% pada tiap kegiatan justru mendorong inefisiensi, dikarenakan pemerintah nagari berpotensi merealisasikan upah yang telah dianggarkan tersebut, melalui realisasi pembayaran yang melebihi Standar Harga Kabupaten. Sedangkan faktor penyebab terjadinya inefisiensi teknis sistem dikarenakan pemerintah nagari masih belum mempunyai ketersediaan data kelompok pekerja menganggur dan setengah menganggur dan penerima manfaat yang akurat dan dapat dipeomani. Sehingga tahapan perencanaan tidak dapat secara cermat mengestimasi jumlah target dan realisasi serapan pekerja dari kedua kelompok tersebut, termasuk tidak adanya data kemiskinan di nagari, untuk mengidentifikasi penerima manfaat ARTM.

B. Saran

1. Atas masih adanya selisih/ketidakkuratan serta ketidaklengkapan data pada aplikasi Sipede, sebaiknya TA P3MD dapat berkoordinasi dengan pemerintah nagari, agar data yang ada dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan

keputusan yang lebih valid dan terukur, sampai dengan tingkat pusat (dhi. KemendesPDTT).

2. Pemerintah nagari sebaiknya lebih efisien dalam mengelola anggaran belanja DD, khususnya kegiatan PKTDes dengan tetap patuh pada regulasi dan harga pasar yang berlaku di wilayahnya. Selain itu, pemerintah nagari dapat mengoptimalkan penyerapan pekerja dari kelompok menganggur dan setengah menganggur, sebagaimana diamanatkan menjadi tujuan pelaksanaan PKTDe.
3. Penelitian ini masih sebatas melakukan analisa mendalam pada unit analisa terpilih, penelitian lebih lanjut dengan metode dan unit analisa lain diperlukan sebagai bahan pengayaan dan masukan khususnya dari sisi kebijakan. Hal ini dikarenakan kegiatan PKTDes juga menjadi program prioritas di era Pandemi Covid-19, selain penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

